



ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA

EDUKASI POLITIK: Warga difabel tuli mengikuti forum disabilitas demokrasi Jogjakarta di Bawaslu Kota Jogja, kemarin (19/6).

Difabel Rentan Tercecer dari Daftar Pemilih

JOGJA, Radar Jogja - Penyanggah disabilitas atau difabel rentan tercecer dari daftar pemilih. Padahal, disabilitas mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu. Sesuai UU No 7/2017 tentang Pemili-

han Umum Pasal 5.

Widi Haryanti, penggagas Difabel Demokrasi Kota Jogja membenarkan masih ditemukannya difabel yang tercecer dari daftar pemilih. Hal itu menimbulkan keprihatinan baginya. Untuk itu, dia bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jogja mengagagas Difabel Demokrasi ✪ **Baca Difabel...** Hal 7



ADA KESETARAAN: Bawaslu Kota Jogja memberikan edukasi politik dan pengawasan partisipatif untuk difabel atau disabilitas tuli.

ELANG KHARISMA DEWANGGARADAR JOGJA

Difabel Rentan Tercecer dari Daftar Pemilih

Sambungan dari hal 1

"Ketika saya melihat data, masih ada beberapa ada kawan yang tercecer," ucapnya kepada *Radar Jogja* kemarin (19/6).

Menilik pada pemilu-pemilu sebelumnya, jumlah difabel yang tercatat sebagai pemilih dalam Pemilu 2014 hanya 300-an orang. Kemudian naik drastis pada Pemilu 2019, mencapai 1.671 orang. "Melihat fakta itu, ada perubahan yang signifikan. Jadi pada Pemilu 2024, pasti ada kemungkinan penambahan lagi. Karena yang tercecer itu memang ada," paparnya.

Tercecernya difabel dari data pemilih diakibatkan oleh beragam faktor. Pertama, difabel yang merasa apatis dengan politik. Kedua, keluarga difabel yang kurang mendukung. Ketiga, minimnya ketersediaan informasi bagi difabel. Terutama, bagi difabel tuli dan *down syndrome*. "Padahal pemilu merupakan

tonggak untuk bisa terpenuhi hak-hak difabel," lontarnya.

Widi menjelaskan, calon pemimpin harus memperhatikan setiap komponen masyarakat, salah satunya difabel. Ketika dia dipilih, pemimpin pun wajib membawa perubahan yang lebih baik bagi difabel. "Semua ini (perubahan menuju kesejahteraan difabel, *Red*) berawal dari pemilu," jabarnya.

Untuk itu, Widi menekankan pentingnya pendidikan politik bagi difabel. Agar kesejahteraan difabel dapat dipenuhi. Ketersediaan informasi mengenai calon yang akan dipilih pun, menurutnya, penting. "Salah satu yang sulit memperoleh informasi itu adalah teman-teman tuli," sebutnya.

Dikatakan, tidak semua penyelenggara atau pengawas pemilu mampu memberikan informasi pada tuli. Lantaran adanya hambatan bahasa isyarat. Tapi di sisi lain, tidak semua tuli bi-

sa bahasa isyarat.

"Yang tidak sekolah, sama sekali tidak bisa bahasa isyarat. Ini sebenarnya ada pendekatan tersendiri pada keluarga. Semestinya, keluarga yang intens mencari informasi tentang masalah demokrasi anggotanya yang difabel," ucapnya.

Menyadari itu, Bawaslu Kota Jogja menggelar pendidikan politik bagi tuli. Ketua Bawaslu Jogja Tri Agus Inharo menegaskan, ada kesetaraan bagi difabel. "Karena negara kita ber-Bhinneka Tunggal Ika, spiritnya inklusi," cetusnya.

Sebanyak 20 tuli diberikan informasi terkait politik. Diharapkan mereka nantinya dapat turut berperan aktif dalam menyuarakan demokrasi yang lebih baik. Salah satunya, menolak politik uang. "Mereka juga bisa meredam ujaran kebencian atau berita bohong di Kota Jogja," tandasnya. (*fat/laz/fj*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005